

KATALOG : 4102004.3327

2016

**Indikator  
Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Pemalang**



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PEMALANG





2016

**Indikator  
Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Pemalang**

---

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2016**

Katalog BPS : 4102004.3327  
No. ISBN :  
No. Publikasi : 3 3 2 7 0 . 1 7 . 0 7  
Ukuran Buku : 15,59 x 21 cm  
Jumlah Halaman : viii + 78 Halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar kulit : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Pemalang

Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Pemalang

*Boleh Dikutip dengan Menyebutkan Sumbernya*

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang 2016 dapat tersusun. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.

Publikasi ini menyajikan data dasar tentang kesejahteraan rakyat Kabupaten Pemalang. Data dasar yang dicakup dalam publikasi ini meliputi tujuh bidang yakni kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, perumahan dan permukiman, serta sosial budaya. Data yang digunakan bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta data sekunder yang berasal dari dinas/instansi terkait.

Kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif terhadap publikasi ini sangat diharapkan bagi penyajian di masa mendatang.

Pemalang, September 2017

Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Pemalang  
Kepala,

Dra. Prita Rextiana, MM  
NIP. 196603221991032001

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul.....	i
Lembar Katalog .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Penjelasan Teknis .....	1
Pendahuluan.....	5
Tinjauan Umum .....	9
1. Kependudukan .....	11
2. Kesehatan .....	24
3. Pendidikan .....	36
4. Ketenagakerjaan.....	45
5. Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga .....	57
6. Perumahan dan Permukiman .....	62
7. Kemiskinan.....	77
Daftar Pustaka .....	79

## DAFTAR TABEL

		Hal.	
Tabel	1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	11
Tabel	1.5	Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pemalang, 2014-2014	23
Tabel	4.	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Sebelum Pencacahan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang, 2016.....	48
Tabel	4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun keAtas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kab. Pemalang.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pemalang, 2009-2016 .....	21
Gambar 2.2 Persentase Balita Menurut Cakupan Imunisasi di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	27
Gambar 2.3 Persentase Baduta 0-23 bulan yang pernah diberi ASI Eksklusif di Kabupaten Pemalang, 2016 ...	30
Gambar 2.4 Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi Lengkap di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	31
Gambar 2.5 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	32
Gambar 2.6 Persentase Penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	33
Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan Pemalang, 2016 .....	34
Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pemalang, 2016 ...	38
Gambar 3.2 Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca dan Tulis di Kabupaten Kulon Progo, 2016.....	40
Gambar 3.3 Angka Melek Huruf di Kabupaten Pemalang, Tahun 2016 .....	41
Gambar 3.4 Banyaknya Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pemalang, Tahun Ajaran 2012/2016 .....	43
Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguranterbuka 2013-2015 .....	50

Gambar 4.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah jam kerja di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	55
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Per kapita per bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	60
Gambar 5.2	Persentase rata-rata Pengeluaran Menurut kelompok makanan di Kab. Pemalang, 2016	61
Gambar 5.3	Persentase rata-rata Pengeluaran Menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Pemalang, 2016.....	61
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah per Kapita di Kabupaten Pemalang 2016 .....	65
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Pemalang, 2016..	66
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	67
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	70
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum di Kabupaten Pemalang, 2016 .....	71
Gambar 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke tempat penampungan di Kabupaten Pemalang 2016.....	72



Gambar 6.7	Persentase Rumah Tangga yang Menurut Fasilitas Tempat buang air besar, 2016 .....	73
Gambar 6.8	Persentase Rumah Tangga yang Menurut Tempat penampungan akhir tinja, 2016	74
Gambar 6.9	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Pemalang, 2016	75
Gambar 7.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Pemalang, 2006-2016	78

## PENJELASAN TEKNIS

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk menurut kelompok umur** adalah pengelompokan penduduk menurut umur dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari 0 tahun.
3. **Rumah tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami seluruh bangunan fisik atau sensus (bangunan tempat tinggal) dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaannya makan dan kebutuhan sehari-hari satu dapur/bersama-sama.
4. **Kepadatan Penduduk/Km<sup>2</sup>** adalah rata-rata jumlah penduduk per km<sup>2</sup>.
5. **Angka Beban Tanggungan** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang memasuki usia produktif (umur 15 - 64 ).
6. **Sex ratio** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

7. **Penghitungan umur** didasarkan pada tahun masehi dan menurut ulang tahun terakhir (pembulatan ke bawah).
8. **Umur perkawinan pertama** menunjukkan umur saat seseorang melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.
9. **Masih Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada dibawah pengawasan Kemdiknas, Kemenag, Instansi negeri lain maupun swasta.
10. **Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis** apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.
11. **Puskesmas** adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

12. **Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Bila ada tempat perawatan digolongkan poliklinik.
13. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan.
14. **Bekerja** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.
15. **Mencari Pekerjaan** adalah penduduk 15 tahun ke atas yang sedang berusaha mendapatkan/mencari pekerjaan.
16. **Bukan Angkatan Kerja** adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan.
17. **Sekolah** adalah penduduk 10 tahun ke Atas selama seminggu melakukan kegiatan bersekolah.
- 18 **Mengurus Rumahtangga** adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.
19. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan dalam pekerjaan dari angkatan kerja.

20. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
21. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang yang termasuk mencari pekerjaan dan pernah bekerja.
22. **Pengeluaran** adalah pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dan bukan makanan.
23. **Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan** adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi dan keanekaragaman daerah secara efektif dan efisien. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa wujud otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang diatur peraturan pemerintah.

Dengan semakin dekat rentang kendali pemerintahan, maka otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik. Hak otonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih merata.

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama dari program perekonomian pada otonomi daerah. Dalam kaitan tersebut diperlukan suatu perencanaan program yang matang dan dapat mengakomodir tingkat kesejahteraan bagaimana seharusnya dicapai, apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, bagaimana prosedur pelaksanaannya dan bagaimana memantau

hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran (target) yang diinginkan atau belum.

Menyikapi hal itu perlu adanya wahana yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih komprehensif, akomodatif, objektif, terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian diperlukan data yang memuat indikator-indikator kesejahteraan rakyat guna menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.

Indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang diukur dari hasil Susenas, Sakernas serta data-data pendukung lainnya seperti yang ditampilkan dalam publikasi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum di Kabupaten Pemalang.

Visi Kabupaten Pemalang seperti yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Dengan Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ini diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil menuju Kabupaten Pemalang yang mandiri dan aman, serta dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat daam melakukan berbagai aktivitas.

## 2. Tujuan

Buku Indikator Kesra Kabupaten Pematang Jaya 2016 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai kesejahteraan ekonomi penduduk di Kabupaten Pematang Jaya. Dengan harapan semakin tersedianya berbagai jenis statistik kesejahteraan rakyat pada tingkat kabupaten dan dapat pula dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga penelitian atau individu yang berminat.

Melalui buku ini diharapkan dapat merangsang pemikiran pembentukan indikator-indikator kesejahteraan rakyat dalam satuan yang lebih sempit. Dengan demikian gambaran menyeluruh tentang tahapan pencapaian pembangunan di masing-masing wilayah menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan maupun perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

## 3. Ruang Lingkup

Indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) ini mencakup berbagai bidang yaitu kependudukan, pendidikan, kesehatan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, angkatan kerja, perumahan dan permukiman, serta sosial budaya.

Dalam pengertian yang luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*).



#### **4. Sumber Data**

Sumber data utama Inkesra 2016 ini bersifat primer, yakni dikumpulkan dan diolah oleh BPS seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan lain-lain. Selain menggunakan data primer, publikasi ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang terkait.

<http://pemalangkab.bps.go.id>

## TINJAUAN UMUM

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah yang terletak di jalur pantura barat. Secara geografis Kabupaten Pemalang terletak pada :

- Sebelah Barat : Bujur Timur 109° 17' 30"
- Sebelah Timur : Bujur Timur 109° 40' 30"
- Sebelah Utara : Lintang Selatan 7° 20' 11"
- Sebelah Selatan : Lintang Selatan 8° 52' 30"

Batas Wilayah Kabupaten Pemalang adalah:

---

- Barat : Kabupaten Tegal
- Timur : Kabupaten Pekalongan
- Utara : L a u t Jawa
- Selatan : Kabupaten Purbalingga

Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 111,530 ha (1.115,30 Km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan. Secara umum kondisi wilayahnya terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk adalah sebanyak 1.292.573 jiwa.

Sampai dengan tahun 2016, pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang sedikit demi sedikit telah menampakkan hasilnya. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang tetap diupayakan untuk mempercepat pencapaian keberhasilan pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun dan peningkatan ini sebagai acuan tahap pembangunan berikutnya, sehingga visi Kabupaten Pemalang akan dapat segera tercapai

<http://pemalangkab.bps.go.id>



# ***Kependudukan***

<http://penelitianlab.bps.go.id>

## BAB I

# KEPENDUDUKAN

Arah kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pada umumnya berorientasi pada pembangunan kependudukan. Penduduk tidak saja berperan sebagai obyek pembangunan, tetapi juga menjadi subyek pembangunan. Jadi, pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.

Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dan kualitasnya rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal dan lainnya penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia menuju Kabupaten Pematang Jaya yang sehat, mandiri dan sejahtera menjadi target utama pembangunan. Selain menjadi target tentu saja dengan tersedianya manusia yang berkualitas, bermoral, dan

mau berpikir untuk kemajuan Pemalang, maka proses perencanaan program pembangunan akan berjalan sesuai harapan dan implementasinya harus yang bersifat lebih mudah dijalankan dan direalisasikan.

Oleh sebab itu dalam menangani permasalahan penduduk guna menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk yang besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya penduduk yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Pemalang, serta diharapkan penduduk yang ada di wilayah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan pemetik hasil-hasil pembangunan. Berbagai aspek yang menyangkut kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin merupakan indikator pokok yang akan dibahas pada bab ini.

### **1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan menyebabkan beban pembangunan akan semakin berat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah kependudukan yang serius. Apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

dapat menimbulkan adanya ketidakmampuan ekonomi untuk mengatasi bertambahnya penduduk. Hal ini berakibat timbulnya berbagai permasalahan di bidang lain terutama yang menyangkut kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan dengan program pembangunan. Begitu pula pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah juga akan menjadi masalah tersendiri karena akan menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Penduduk suatu wilayah merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2016 mencapai 1.292.573 jiwa. Dari sejumlah tersebut, komposisi penduduk laki-laki sebanyak 639.797 jiwa dan perempuan sebanyak 652.776 jiwa. Pertambahan penduduk Pematang Jaya sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

Gencarnya program Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menarik para investor untuk menanamkan modal cukup berdampak di bidang kependudukan. Berdirinya perusahaan-perusahaan, pada beberapa terakhir ini, baik swasta maupun BUMD, telah mampu menyerap tenaga kerja dan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk.

Walapun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pematang Jaya masih tergolong rendah, akan tetapi peningkatan laju pertumbuhan penduduk pada dekade terakhir ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Peningkatan pertumbuhan penduduk akan berarti berdampak pada penambahan penduduk tiap tahunnya. Hal ini tentunya memerlukan penambahan berbagai fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan pokok (pangan dan papan).

## **1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk**

Distribusi penduduk secara geografis umumnya tidak merata pada beberapa wilayah dan tingkat kepadatannya pun berbeda-beda, sehingga karakteristik demografi secara geografis cukup kompleks. Kepadatan yang sudah pada titik jenuh, kemungkinan akan lebih banyak memberi dampak negatif, akibat terjadinya ketimpangan sumber daya. Jika tidak segera dilakukan keseimbangan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti fasilitas sosial, maka permasalahan sosial dan kriminalitas kemungkinan akan meningkat.

Ukuran tingkat kepadatan yang ideal memang sulit untuk ditentukan karena sangat tergantung kepada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk untuk memanfaatkan potensi yang ada. Pada umumnya tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial, disamping sangat menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya jika tingkat kepadatan penduduk sangat rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas



yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi relatif mahal. Untuk mewujudkan pemerataan dan keseimbangan berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya adalah meningkatkan infrastrukturnya sehingga bisa meningkatkan daya tarik masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan persebaran dan kepadatan penduduk yang merata, dengan kondisi yang ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan proyeksi penduduk perkecamatan pada tabel 1.1 terlihat bahwa, pada tahun 2016 penduduk terbanyak tersebar di Kecamatan Pematang yang mencapai 177.602 jiwa, diikuti Kecamatan Taman yang mencapai 161.742 jiwa dan Kecamatan Petarukan sebanyak 72.663 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Warungpring yang hanya mencapai 38.846 jiwa.

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang, 2016

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Moga	31 501	31 975	63 476
Warungpring	19 175	19 671	38 846
Pulosari	27 703	28 152	55 855
Belik	52 416	52 037	104 453
Watukumpul	32 222	32 550	64 772
Bodeh	27 103	27 400	54 503
Bantarbolang	34 626	37 229	71 855
Randudongkal	47 504	49 927	97 431
Pemalang	87 907	89 695	177 602
Taman	80 234	81 508	161 742
Petarukan	72 663	74 098	146 761
Ampelgading	32 717	33 751	66 468
Comal	44 170	44 633	88 803
Ulujami	49 856	50 150	100 006
<b>Pemalang</b>	<b>639 797</b>	<b>652 776</b>	<b>1 292 573</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS

### 1.3 Angka Beban Ketergantungan

Struktur umur penduduk merupakan salah satu karakteristik pokok kependudukan disamping jenis kelamin. Struktur umur ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi. Struktur umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas. Kelompok umur 15-64 tahun dikategorikan sebagai kelompok usia produktif. Dikatakan demikian karena pada kelompok umur ini penduduk dianggap sebagai kelompok yang mampu melakukan kegiatan ekonomi. Untuk kelompok umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai kelompok umur yang tidak produktif karena belum mampu atau sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian angka ketergantungan dapat digambarkan melalui berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 1.2. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Pematang, 2014 – 2016

Tahun	Umur			Total	Angka Ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	29,37	64,18	6,45	100,00	55,84
2015	28,12	64,87	7,01	100,00	54,16
2016	27,66	65,48	6,86	100,00	52,73

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif semakin meningkat, sedangkan persentase penduduk usia tidak produktif semakin menurun. Pada tahun 2016, komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 27,66 persen penduduk Pemalang berusia muda (umur 0-14 tahun), 65,48 persen berusia produktif (umur 15-64 tahun), dan yang berumur 65 tahun ke atas sebesar 6,86 persen.

Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih jauh untuk mencapai bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Secara angka kondisi ini tercapai saat angka ketergantungan sudah berada di bawah 50 persen. Kabupaten Pemalang untuk mencapai kondisi ini masih dibutuhkan waktu yang relative lama. Pada tahun tahun 2016, angka ketergantungan di Kabupaten Pemalang telah mencapai 52,73 persen. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial.

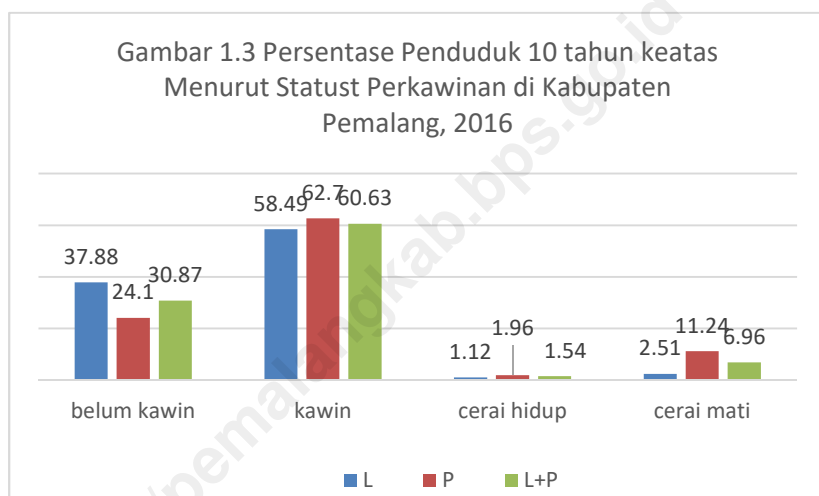
#### 1.4 Status Perkawinan

Karakteristik lain dalam kependudukan yang juga perlu untuk diamati adalah status perkawinan. Secara demografi status perkawinan merupakan faktor antara dalam penghitungan fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status perkawinan juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan secara immaterial. Makin tinggi persentase penduduk dengan status cerai hidup maka semakin terlihat bahwa semakin tidak kokohnya kualitas rumah tangga dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didefinisikan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam publikasi ini perkawinan yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai pasangan suami istri.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 30,87 persen berstatus belum kawin, 60,63 persen berstatus kawin, 1,54 persen cerai hidup, dan mereka yang cerai mati sebesar 6,96 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang berstatus belum kawin yaitu 37,88 persen berbanding 24,10 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena seorang laki-laki harus benar-benar siap secara mental

maupun menafkahi rumah tangga dalam memutuskan untuk berumah tangga. Sedang penduduk yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati persentase perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Hal ini karena bagi laki-laki yang ditinggal pasangannya kemungkinan untuk menikah lagi biasanya lebih besar. Sedangkan untuk perempuan lebih banyak yang memilih untuk bertahan dengan status jandanya atau lebih memilih hidup sendiri.



Sumber : Susenas 2016

### 1.5 Umur Perkawinan Pertama

Fertilitas sebagai salah satu ukuran yang sangat penting dalam demografi dimana akan mempengaruhi perubahan penduduk dari sisi penambah jumlahnya. Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Makin muda usia perkawinan memberikan peluang untuk memperpanjang masa reproduksi dan hal ini akan menjadikan tingkat kelahiran

semakin tinggi. Sedangkan semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti tingkat kelahiran akan rendah.

Menurut beberapa pakar kesehatan usia yang baik untuk menikah adalah 20-29 tahun karena secara medis reproduksi dan jumlah ovumnya masih sangat baik. Perkawinan di usia yang terlalu muda mempunyai resiko yang cukup tinggi bagi ibu dan anak. Semakin muda usia perkawinan pertama, maka semakin besar pula resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik pada keselamatan ibu maupun anak. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan pertama melebihi usia yang dianjurkan, juga semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Berdasarkan hasil Susenas, pada tahun 2016 usia perkawinan pertama wanita di Kabupaten Pematang Besar sudah sesuai anjuran kesehatan yaitu berada pada kisaran umur 19-24 tahun yang mencapai 43,19 persen. Pada usia ini wanita sudah dianggap cukup matang memasuki kehidupan berumah tangga maupun seksual. Dengan demikian diharapkan seorang wanita bisa melahirkan dengan lebih aman sehingga setiap keluarga tidak harus kehilangan ibu atau kehilangan anak karena persiapan yang tidak matang dan kesehatan yang tidak memadai.

Pada tahun 2016 persentase wanita menikah di usia dini (usia di bawah 19 tahun) sebesar 46,95 persen. Usia perkawinan yang relatif muda dianggap sebagai salah satu penghalang untuk mencapai masa depan yang lebih baik akibat beban mengurus rumah tangga yang terlalu awal. Bagi seorang wanita, pernikahan awal, terutama melahirkan anak berpengaruh terhadap

kesejahteraan, pendidikan dan kemampuan memberikan andil terhadap masyarakatnya. Dengan memberikan kesempatan bersekolah yang lebih tinggi kepada wanita diharapkan dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi seorang wanita yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kelahiran.

Tabel 1.5  
 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin  
 Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pemalang  
 Tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
< 17 th	23,53	7,12	22,40
17-18 th	28,94	19,56	24,55
19-24 th	38,76	64,62	43,19
25 th+	8,77	8,70	9,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014-2016



---

2

***Kesehatan***



The graphic consists of a central green square containing the number '2'. Below the square are two horizontal bars: a blue one on top and a yellow one on the bottom. The word 'Kesehatan' is written in a bold, italicized, dark blue font across the middle of these bars.

<http://www.palangkab.bps.go.id>

## BAB II KESEHATAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan mutlak harus dilaksanakan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma-norma agama.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan individu dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

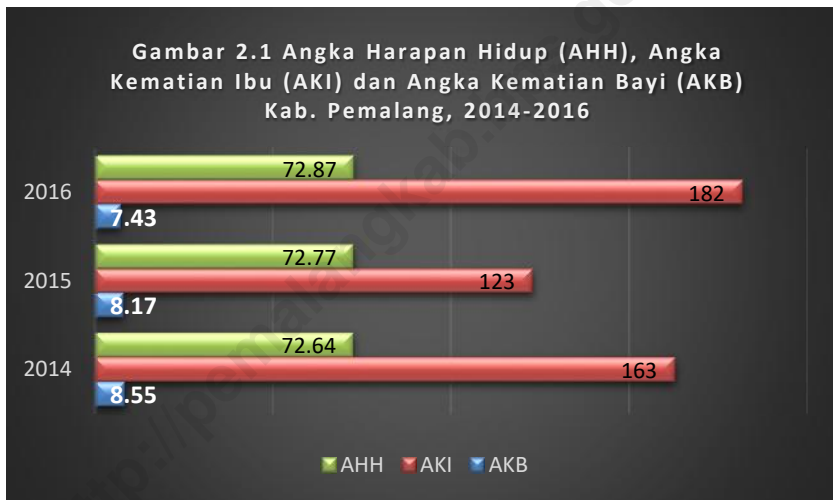
Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup manusia, yang pada gilirannya tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sistem kesehatan nasional menggariskan pembangunan bidang kesehatan pada hakekatnya merujuk pada tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sosial ekonomi.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini dianggap telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Peningkatan kesehatan penduduk diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk pula. Dalam keadaan kurang atau tidak sehat, kualitas pekerjaan yang dihasilkan tidak optimal. Kondisi kesehatan yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk diantaranya dapat dilihat dari angka kematian bayi, jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, penolong kelahiran, balita yang diimunisasi, persentase balita yang pernah disusui, serta lamanya pemberian ASI.

## 2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat antara lain angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Angka kematian bayi atau disebut juga sebagai *Infant Mortality Rate* (IMR) didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan angka harapan hidup merupakan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir.



Angka kematian bayi di Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2014 angka kematian bayi sebesar 8,55 per 1000 kelahiran hidup, menjadi 8,17 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Pada tahun 2016 turun menjadi 7,43 per 1000 kelahiran hidup.

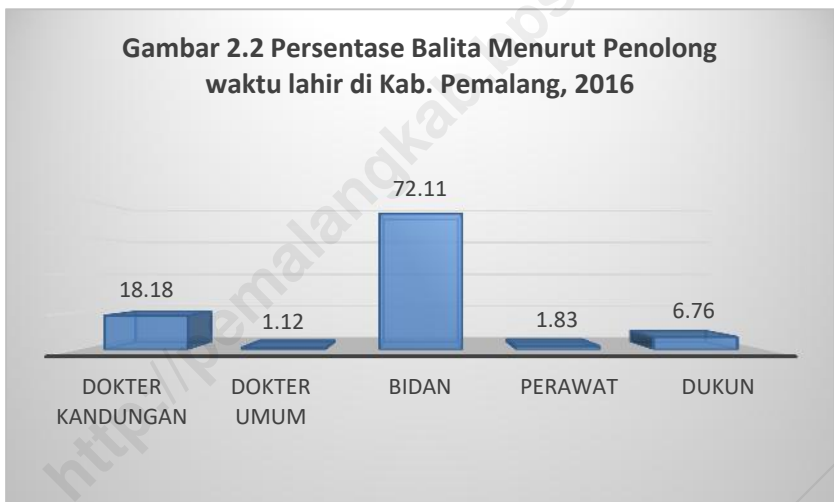
Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan dimana tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua dari bayi. IMR mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan dan lain-lain. Selain itu, IMR juga mencerminkan tingkat kesehatan ibu. Dengan demikian, penurunan angka IMR ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan pemerintah khususnya di bidang kesehatan, yang telah berhasil dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Angka harapan hidup sejak 2014 – 2016 juga semakin meningkat dari 72,64 pada tahun 2014 menjadi 72,77 pada tahun 2015, terus meningkat dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 72,87. Semakin tinggi angka harapan hidup ini menunjukkan semakin meningkatnya derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup ini berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Secara teoritis, menurunnya angka kematian bayi akan menyebabkan meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian kondisi yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya adalah sejalan dengan teori yang ada. Angka harapan hidup yang terus bertambah banyak dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang semakin rendah seperti yang terlihat pada gambar 2.1.

## **2.2 Penolong Persalinan**

Indikator lain yang juga digunakan sebagai tolok ukur dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat diantaranya adalah kondisi persalinan. Kesehatan ibu berpengaruh terhadap kesehatan balita, selain itu penolong kelahiran merupakan faktor lain yang

mempengaruhi kondisi kesehatan balita. Penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses kelahiran yang ditolong dukun atau lainnya. Dengan kata lain persalinan yang ditolong oleh tenaga medis menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran.



Sumber :Susenas 2016

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2016 hampir semua Balita proses kelahirannya ditolong oleh tenaga medis. Proses kelahiran yang ditolong tenaga medis bidan paling tinggi dibanding tenaga medis lainnya yaitu sebanyak 72,11 persen kemudian

diikuti dengan penolong oleh dokter kandungan (18,18 persen), perawat (1,83 persen) dan dokter umum sebesar 1,12 persen. Tingginya persentase balita dengan penolong kelahiran oleh tenaga medis ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan kelahiran. Namun demikian masih ada penolong kelahiran balita yang dilakukan oleh non medis (dukun). Kondisi ini menggambarkan semakin majunya pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran, maupun karena adanya peningkatan kemudahan akses ke pelayanan kesehatan medis.

### **2.3 ASI dan Imunisasi**

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan perkembangan anak sejak usia dini. Salah satu faktor penting yang mempunyai pengaruh dalam upaya tersebut adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). ASI merupakan makanan paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena mengandung nilai gizi yang tinggi. ASI juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit, khususnya ASI Eksklusif. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI diantaranya dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pemahaman para Ibu untuk memberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Pematang masih belum sempurna. Hal ini terlihat persentase baduta usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI Eksklusif masih rendah yaitu hanya 41,31 persen.

**Gambar 2.3 Persentase Baduta 0-23 bulan yang pernah diberi ASI Eksklusif di Kab. Pematang, 2016**



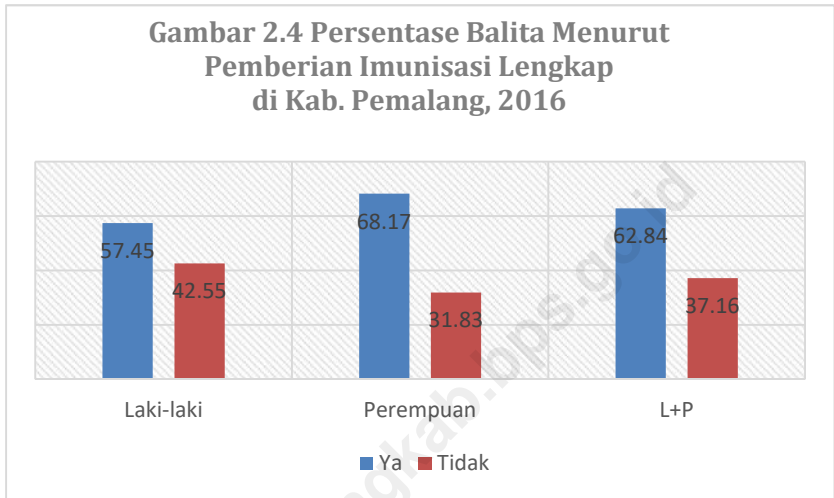
Hal ini berarti bahwa perlu edukasi untuk memberikan pemahaman ibu mengenai pentingnya pemberian ASI Eksklusif mengingat manfaatnya sangat baik untuk perkembangan bayi.

Selain pemberian ASI, balita sebagai generasi penerus perlu mendapat perhatian lain yakni mengenai masalah kesehatannya. Dengan memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dapat menjadikan balita sebagai SDM yang berkualitas di masa mendatang. Untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi di masa mendatang dapat dilakukan upaya pemberian imunisasi pada balita. Imunisasi utamanya ditujukan untuk mencegah dari kemungkinan terserang penyakit berbahaya. Jenis imunisasi standar yang diberikan adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B.

Secara umum persentase balita di Kabupaten Pematang yang sudah mendapat imunisasi lengkap masih relatif rendah yaitu baru mencapai 62,84 persen. Bila dilihat jenis kelamin balita terlihat



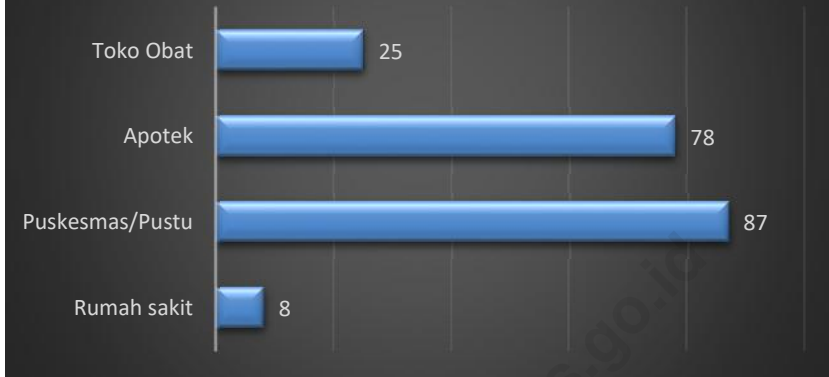
bahwa balita perempuan lebih tinggi dibanding balita laki-laki terkait dengan cakupan kelengkapan imunisasi pada tahun 2016, seperti dapat dilihat pada gambar 2.4.



#### 2.4 Ketersediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui program-program pembangunan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan ini sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Beberapa program dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sejenisnya maupun melalui penyuluhan kesehatan.

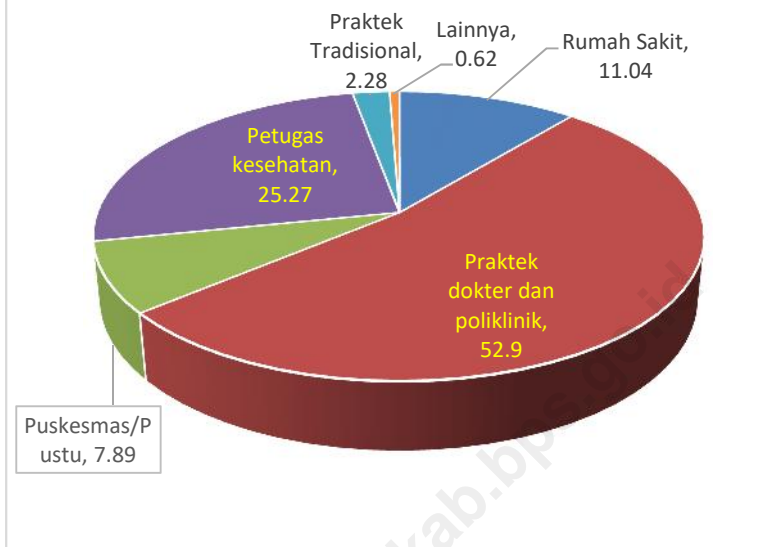
**Gambar 2.5 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kab. Pematang, 2016**



Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran berperilaku hidup sehat, sehingga derajat kesehatan masyarakat mampu ditingkatkan.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pematang telah membangun sebanyak 87 puskesmas/puskesmas pembantu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berobat/memelihara kesehatan. Puskesmas/puskesmas pembantu ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pematang. Sedangkan jumlah sarana rumah sakit yang ada di Kabupaten Pematang sebanyak 8 buah. Sarana lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya apotek dan toko obat. Pada tahun 2016 jumlah apotek meningkat menjadi 78 apotek dan tersedia 25 toko obat.

Gambar 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat jalan Menurut Tempat Berobat Di Kab. Pemalang, 2016



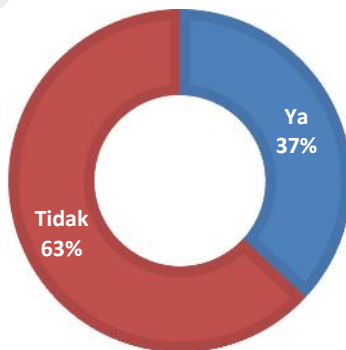
Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2016 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan paling banyak berobat ke Praktek dokter dan poliklinik yaitu sebesar 52,9 persen. Petugas kesehatan merupakan fasilitas kesehatan kedua yang banyak dikunjungi oleh penduduk sebesar 25,27 persen, kemudian disusul rumah sakit sebesar 11,04 persen dan puskesmas/pustu sebesar 7,89 persen. Besarnya persentase penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan medis menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan mutu pelayanan medis. Selain itu, meningkatnya penduduk yang berobat jalan ke fasilitas medis juga disebabkan karena semakin banyaknya jaminan kesehatan bagi

masyarakat di Kabupaten Pemalang baik berupa Askes, Jamkesmas, Jamkesos, maupun Jamkesda. Pemilihan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, kondisi social ekonomi penduduk dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

## 2.5 Keluhan Kesehatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Pemalang yang mengalami keluhan kesehatan dengan berbagai jenis keluhan dalam waktu sebulan sebesar 37 persen, sementara selebihnya yaitu 63 persen mengatakan tidak mengalami keluhan kesehatan.

**GAMBAR 2.7 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN, 2016**



Setiap satu orang dapat mempunyai lebih dari satu keluhan kesehatan dan sistem pengobatan yang dilakukan dapat melalui berbagai cara yaitu dengan berobat jalan atau mengobati sendiri. Berobat jalan bisa dilakukan melalui berbagai fasilitas pelayanan seperti rumah sakit negeri/swasta, praktek dokter/poliklinik, Puskesmas/pustu, praktek nakes, praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin, atau lainnya.

<http://pemalangkab.bps.go.id>

---

3

# ***Pendidikan***

A decorative graphic consisting of a green square at the top, a blue horizontal bar below it, and a yellow horizontal bar at the bottom. The word 'Pendidikan' is written in a bold, italicized font across the blue and yellow bars.

<http://penelitiankab.bps.go.id>

## **BAB III**

### **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa.

Indikator yang digunakan untuk melihat hasil proses pembangunan yang berorientasi penduduk, salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan berwawasan, sehingga pembaharuan pendidikan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah, maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

Dalam pembangunan, pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian paling besar. Hal ini karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Beberapa permasalahan pendidikan seperti kesempatan memperoleh pendidikan, kualitas pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu mendapat penanganan khusus dari pemerintah dan dukungan yang optimal

dari seluruh lapisan masyarakat, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Dengan tingkat pendidikan yang baik dan berkualitas, orang akan memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

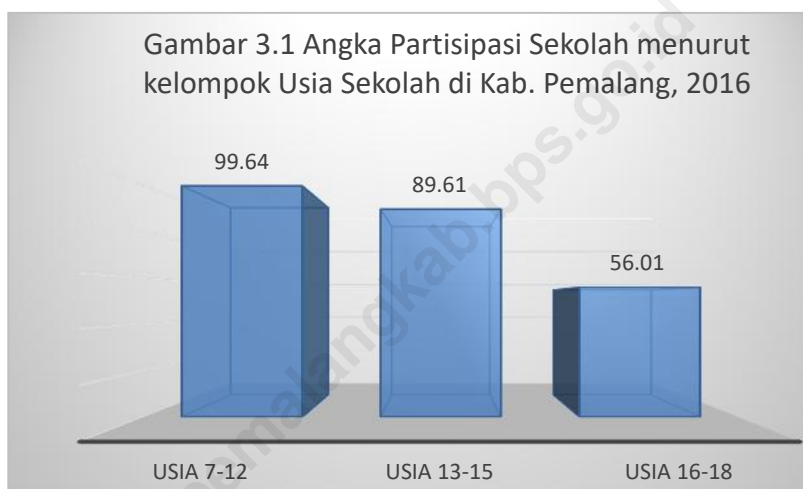
Pada bab ini, gambaran pendidikan yang akan diuraikan meliputi : tingkat partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, dan fasilitas pendidikan.

### **3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah**

Dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Upaya-upaya tersebut misalnya penambahan jumlah sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar dan program wajib belajar 6 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, sehingga banyak penduduk yang dapat bersekolah. Untuk melihat keberhasilan upaya pemerintah di bidang pendidikan, salah satunya dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS).



APS dihitung dengan membagi jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu (umur 7-12; 13-15; atau 16-18) yang sedang bersekolah, dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersangkutan (umur 7-12; 13-15; atau 16-18) dikalikan 100 persen. Meningkatnya APS pada usia sekolah menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.



Sumber : Susenas, 2016

Pada tahun 2016, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,64 persen. Artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, hampir seluruhnya berstatus masih sekolah dan hanya 0,36 persen yang berstatus tidak bersekolah. APS kelompok usia 7-12 tahun belum mencapai 100 persen dimungkinkan karena beberapa alasan. Kegiatan Susenas 2016 menggambarkan keadaan bulan Maret 2016, sehingga dimungkinkan pada tahun ajaran baru 2016 (Juli

2016) yang bersangkutan belum genap berusia 7 tahun dan belum bisa diterima masuk di SD. Angka Partisipasi Sekolah kelompok penduduk usia 13-15 tahun lebih sedikit rendah dibandingkan dengan kelompok penduduk usia 7-12 tahun, yaitu masih mencapai 89,61 persen. Selanjutnya pada kelompok penduduk usia 16-18 tahun APS mencapai 56,01 persen.

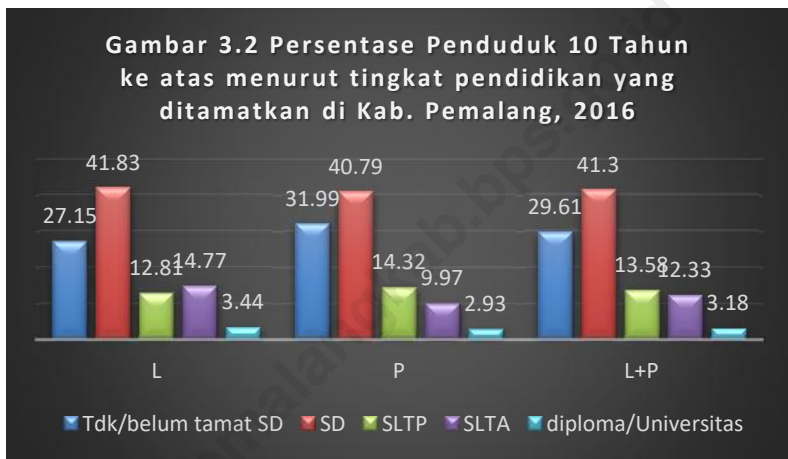
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase penduduk yang masih bersekolah cenderung menurun. Berbagai faktor bisa menyebabkan kondisi tersebut, baik kemungkinan dikarenakan jarak kesekolah yang relatif jauh, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, atau mungkin sebab lainnya sehingga mereka tidak sekolah lagi.

### **3.2 Pendidikan yang Ditamatkan**

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk umur 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Gambar 3.2 menyajikan besarnya persentase penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, persentase penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas sebesar 51,18 persen. Artinya sudah lebih dari separo penduduk di Kabupaten Pematang telah menempuh wajib belajar 9 tahun dan 29,09 persen sisanya masih

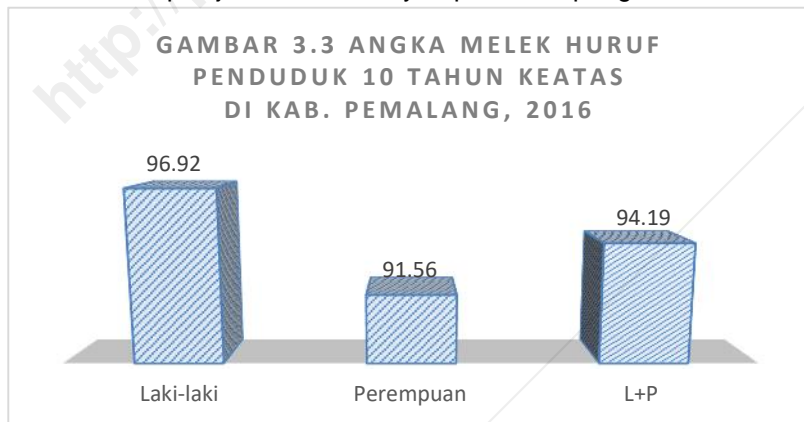
berpendidikan SD ke bawah atau sama sekali belum pernah bersekolah. Rendahnya jumlah penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas ini menggambarkan bahwa belum besarnya kesadaran penduduk Kabupaten Pemalang untuk menyelesaikan pendidikan tidak hanya di tingkat dasar tetapi sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas dan pentingnya pendidikan lebih tinggi.



Jika dilihat menurut jenis kelamin, sampai pada jenjang SD persentasenya didominasi perempuan. Sedangkan mulai pada jenjang SLTP, laki-laki berumur 10 tahun ke atas persentasenya lebih banyak dibandingkan perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTP ke atas mencapai 30,02 persen. Sedangkan penduduk perempuan besarnya kurang dari 30 persen, yaitu sebesar 27,22 persen.

### 3.3 Angka Melek Huruf

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu daerah dapat ditunjukkan oleh kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan Angka Melek Huruf (AMH). Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Dengan kemampuan tersebut seseorang akan lebih mudah dalam mengakses informasi. Selain itu dengan kemampuan tersebut seseorang dapat lebih mudah mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan serta

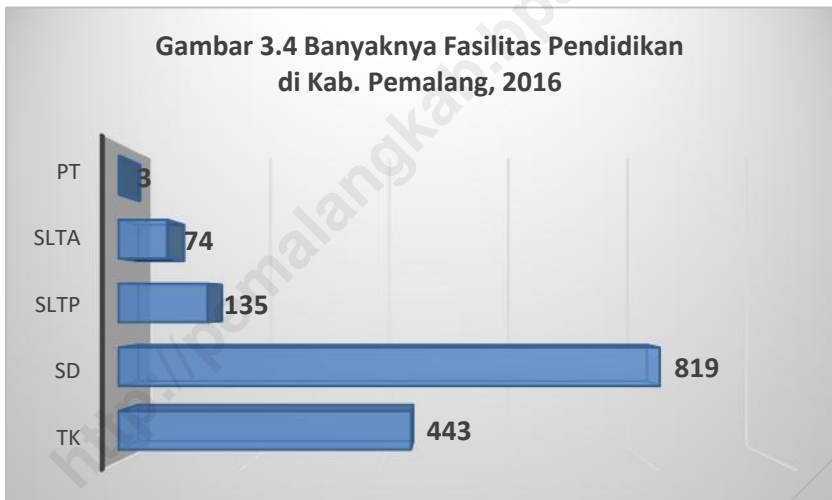


memahami program-program pembangunan. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan melalui besarnya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur melalui aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kualitas diri dan kecerdasan.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, banyaknya penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Pematang Jaya yang dapat membaca dan menulis tercatat sebanyak 94,19 persen. Sisanya sebanyak 5,81 persen adalah mereka yang buta huruf. Pada Gambar 3.3. menunjukkan bahwa angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka melek huruf baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang tingkatannya semakin tinggi. Peningkatan angka melek huruf ini menunjukkan bahwa semakin baiknya mutu pendidikan masyarakat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perbedaan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu tinggi, artinya sudah hampir tidak adpembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pemenuhan pendidikan, sehingga perempuan pun memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam meningkatkan kualitas diri dan kecerdasan pengetahuan.

### 3.4 Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun ajaran 2015/2016, sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Pemalang, untuk Taman Kanak-Kanak (TK)/RA ada sebanyak 443 sekolah, SD/MI ada 819 sekolah, SLTP/MTs ada 135 sekolah dan SLTA/MA ada 74 sekolah. Sementara itu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pemalang masih sangat terbatas dan jumlahnya hanya 3 buah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, STIE Ash Sholeh Pemalang dan Akbid Pemalang



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang

Dengan melihat keadaan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat pendidikan SLTA, siswa belum dapat leluasa dalam menentukan pilihan sekolah yang diinginkan terutama pilihan untuk sekolah di wilayah sendiri. Begitu pula untuk melanjutkan pada

pendidikan tinggi seperti universitas, masih sedikit pilihan yang dapat dilakukan siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih, sehingga banyak siswa memilih melanjutkan sekolah/kuliah di luar Kabupaten Pematang.

<http://pematangkab.bps.go.id>

---



# ***Ketenagakerjaan***

<http://pemerintah.go.id>



## BAB IV

### KETENAGAKERJAAN

Aspek penting dari bahasan ketenagakerjaan adalah tenaga kerja. Menurut pendapat Sumitro (1987), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena manusialah (tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari kelompok penduduk yang bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Sedangkan pengangguran penduduk yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2011).

Besaran angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) . Ketidakseimbangan permintaan terhadap tenaga kerja (*demand of labor*) terhadap penawaran

tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu berdampak pada munculnya masalah dalam bidang angkatan kerja. Ada dua jenis ketidakseimbangan tenaga kerja. Pertama, penawaran lebih besar dibandingkan permintaan tenaga kerja (*excess supply of labor*). Kedua, penawaran lebih kecil dibandingkan permintaan tenaga kerja (*excess demand of labor*). Ketidakseimbangan pertama merupakan permasalahan umum yang disebabkan karena sejumlah angkatan kerja tidak terserap dalam kegiatan ekonomi. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar akan menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran (Sigit, 2000). Agar dapat mencapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya semua angkatan kerja dapat tertampung dalam lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Menurut *International Labor Organization (ILO)* permasalahan ketenagakerjaan selain pengangguran yang umum dihadapi suatu daerah adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja, makin sempitnya lapangan kerja, tingginya angka ketergantungan (*dependency ratio*), rendahnya kontribusi dan penyerapan sektor-sektor pembangunan terhadap ketenagakerjaan, dan belum teridentifikasinya keterkaitan antara pendidikan dan lapangan pekerjaan (Hadi, 2009). Melihat kondisi ketenagakerjaan

yang demikian, maka perlu adanya upaya menggalakkan program yang memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Program tersebut secara tidak langsung meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang lebih mandiri dan mempunyai kualitas yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan taraf hidup penduduk.

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Pematang Jaya, maka pada bab ini akan disajikan ulasan mengenai karakteristik penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam kerja.

#### **4.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja**

Dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik, konsep dan definisi yang digunakan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh ILO. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dimaksudkan dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini selanjutnya dikategorikan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia di

bawah 15 tahun. Analisa terhadap karakteristik penduduk usia kerja dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat aktivitas, tingkat kesempatan kerja dan pengangguran pada situasi di pasaran tenaga kerja.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Sebelum Pencacahan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pematang, 2015

Kegiatan	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>AK</b>	<b>81,73</b>	<b>45,75</b>	<b>63,32</b>
Bekerja	76,69	42,49	59,18
Pengangguran Terbuka	5,04	3,26	4,13
<b>Bukan AK</b>	<b>18,27</b>	<b>54,25</b>	<b>36,68</b>
Sekolah	7,90	6,88	7,38
Mengurus rumah tangga	4,38	43,98	24,65
Lainnya	5,99	3,39	4,66
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sakernas Agustus 2015 (data terakhir sebab tidak ada Sakernas 2016)

Secara umum, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pematang pada tahun 2015 hampir mencapai 935.345 orang. Dari jumlah ini, 63,32 persen termasuk dalam kategori angkatan kerja dan sisanya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, yaitu sebanyak 36,68 persen. Kenyataan ini menunjukkan

bahwa sebanyak 63,32 persen penduduk usia kerja berpartisipasi aktif dalam bursa kerja, dan sisanya tidak aktif.

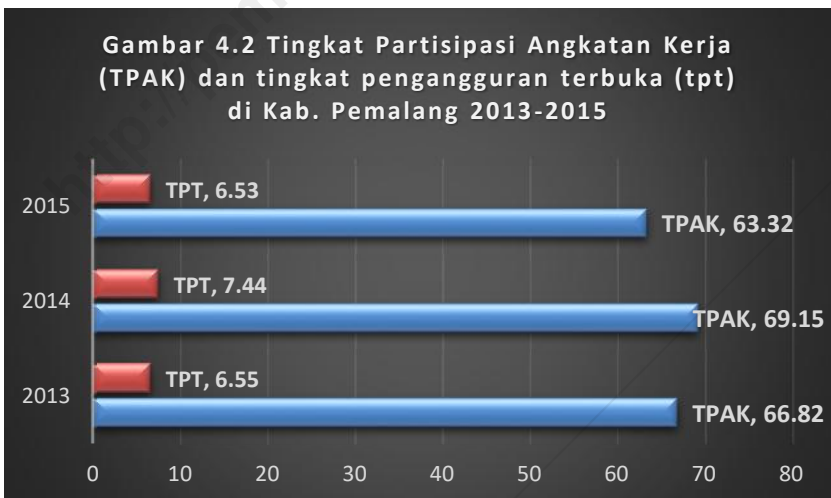
Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat aktivitas di antara laki-laki lebih tinggi dibandingkan tingkat aktivitas di antara perempuan. Fenomena kesenjangan aktivitas jelas terlihat dari persentase perempuan yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi di antara perempuan (54,25 persen) lebih tinggi dibandingkan diantara laki-laki (18,27 persen). Penduduk perempuan mendominasi pada kelompok bukan angkatan kerja karena kemungkinan masih adanya anggapan bahwa laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga dituntut untuk bekerja, sedangkan bagi perempuan lebih baik mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami. Tingginya partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan pada kelompok angkatan kerja yang bekerja atau tingginya perempuan dibandingkan laki-laki pada kelompok bukan angkatan kerja mengakibatkan kesenjangan yang cukup signifikan dalam partisipasi angkatan kerja antar jenis kelamin. Keadaan ini menunjukkan indikasi adanya ketidaksetaraan gender yang inheren, yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

#### **4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perkembangan aktivitas ketenagakerjaan dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk yang secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi pasokan tenaga kerja untuk

menghasilkan barang/jasa. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, besarnya partisipasi penduduk dibidang ketenagakerjaan dapat dilihat melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Meskipun jumlah penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, namun dari tahun ke tahun TPAK laki-laki ada kecenderungan selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penduduk usia kerja dalam jumlah besar bukan merupakan jaminan akan meningkatkan tenaga kerja yang potensial, karena tidak semua penduduk usia kerja masuk dalam golongan angkatan kerja.

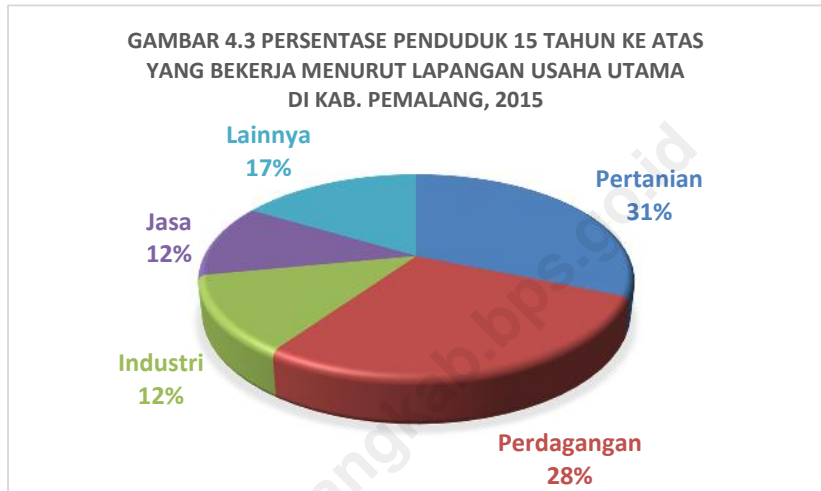


Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa pada periode 2013-2015 di Kabupaten Pematang Jaya terjadi penurunan TPAK dengan diiringi penurunan TPT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya partisipasi penduduk dalam dunia kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan mampu mengurangi tingkat pengangguran. TPAK pada tahun 2015 mencapai 63,32 persen, artinya bahwa dari setiap 100 penduduk usia kerja ada sekitar 63 penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam bursa kerja (angkatan kerja) dan sekitar 37 persen penduduk usia kerja sisanya tidak aktif dalam bursa kerja (bukan angkatan kerja).

#### **4.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perlu dilakukan analisis mengenai lapangan pekerjaan. Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pematang Jaya adalah di sektor pertanian. Pada tahun 2015, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga, bahkan lebih dari separuhnya. Hal ini juga sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

dimana ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 sebagian besar bersifat pertanian.



Sumber : Sakernas Agustus 2015

Seperti halnya pada tahun 2014, pada tahun 2015 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sektor pertanian, yaitu mencapai 31 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Pemalang termasuk sebagai daerah agraris, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergantung dari di sektor pertanian. Sektor berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja

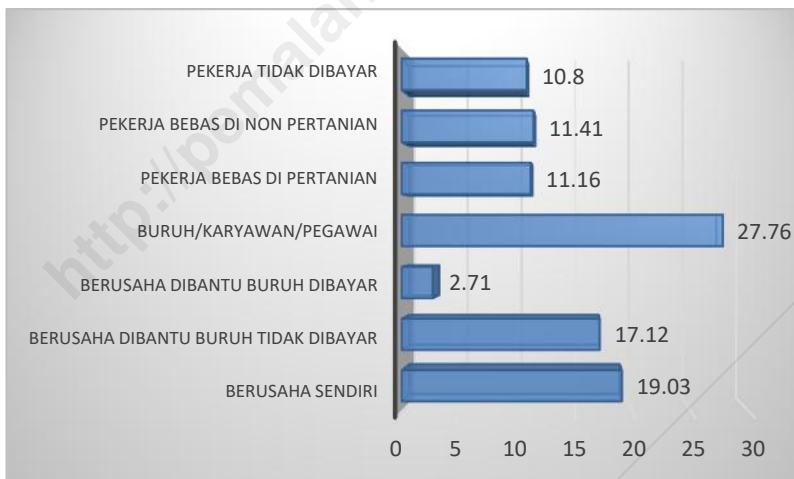


adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industry dan terakhir sektor lainnya. Persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan mencapai 28 persen, sektor jasa sebesar 12 persen, sektor industri sebesar 12 persen dan sektor lainnya hanya menyerap 17 persen.

### 4.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja dalam suatu pekerjaan adalah status pekerjaan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya komposisi status pekerjaan di Pemalang tidak menunjukkan perbedaan yang besar.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Pemalang, 2015



Sumber : Sakernas Agustus 2015

Tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas dengan status buruh/karyawan/pegawai merupakan status pekerjaan yang paling banyak dilakukan yaitu sebesar 27,76 persen. Status pekerjaan yang terbanyak berikutnya adalah *berusaha sendiri* yaitu sebesar 19,03 persen dan berusaha dibantu buruh tidak dibayar sebanyak 17,12 persen. Tingginya penduduk yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (10 persen) memberi indikasi bahwa tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga mereka hanya sekedar membantu usaha dalam suatu kegiatan ekonomi tanpa memperoleh upah/gaji. Kelompok ini merupakan pekerja dengan tingkat produktivitas yang rendah atau kalah bersaing dalam kompetisi memperebutkan lapangan pekerjaan. Fenomena ini kemungkinan disebabkan karena pertumbuhan kesempatan kerja hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tidak efisien dalam menciptakan lapangan kerja produktif sehingga sektor-sektor dimana pekerja tidak produktif tidak memiliki akses yang baik ke sana. Pertumbuhan kesempatan kerja juga mungkin terkonsentrasi ke sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang kecil.

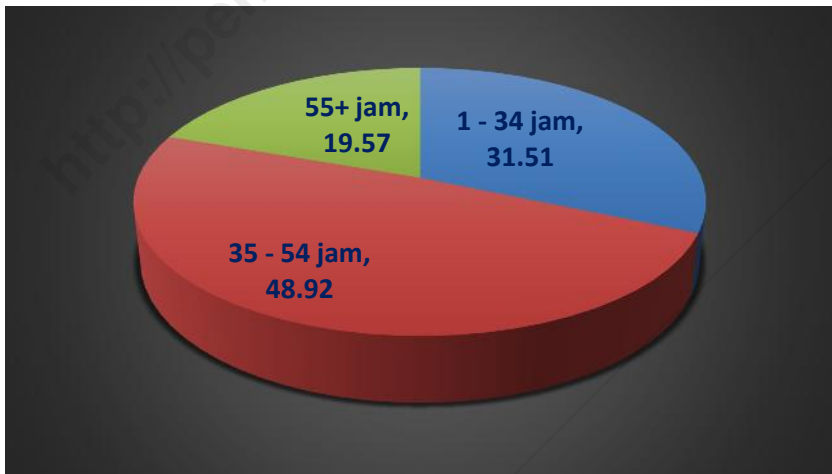
#### **4.4 Jam Kerja**

Dalam mengukur produktivitas tenaga kerja, variabel jam kerja seringkali digunakan sebagai tolok ukurnya. Idealnya semakin banyak jam kerja yang digunakan maka diharapkan output (produktivitas) yang dihasilkan juga semakin banyak. Namun jumlah jam kerja selama seminggu ini tidak sepenuhnya dapat

memberikan gambaran tingkat produktivitas, terutama bagi mereka yang memang menghendaki jam kerja rendah. Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh (*full employed*) atau tidak penuh (*under employed*) ditunjukkan oleh jumlah jam kerja dalam seminggu. Dikatakan sebagai pekerja penuh bila jam kerja seseorang telah mencapai 35 jam atau lebih dalam seminggu.

Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan kelompok jam kerja digambarkan dalam tabel 4.6. Secara umum di Kabupaten Pemalang sebagian besar pekerja masuk kategori pekerja penuh, yaitu sebanyak 48,92 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas penduduk yang bekerja di Pemalang sudah baik dari segi penggunaan jam kerja (lebih dari jam kerja normal). Namun demikian masih terdapat 31,51 persen yang bekerja di bawah jam kerja normal, yang merupakan setengah pengangguran.

Gambar 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Kabupaten Pemalang, 2015



Bila seorang pekerja dalam seminggu yang lalu (dalam periode survei) sementara tidak bekerja atau jam kerjanya nol jam, maka tidak dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pengangguran terbuka. Pengecualian ini berlaku karena sebenarnya statusnya adalah sebagai pekerja, tetapi karena selama pencacahan sedang cuti, sakit, menunggu panen dan sebagainya, maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja. Perlu dicatat, sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu masih termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja

---

5

**Konsumsi & Pengeluaran  
Rumah Tangga**

<http://pemasaran.pbps.go.id>

## **BAB V KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA**

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka secara materi meningkat pula kesejahteraannya. Selain itu tingkat kesejahteraan juga bisa dilihat dari bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatan yang diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti hukum yang dikemukakan oleh Engel (1896) bahwa saat pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang. Terkait dengan Hukum Engel ini, Bennet dalam Latief (2000) menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan akan mengakibatkan individu cenderung meningkatkan kualitas konsumsi pangannya yang ditunjukkan oleh semakin mahal nya

harga (nilai uang) per zat gizi yang dikonsumsi. Berdasarkan hal itu, Bouis dalam Latief (2000) menyatakan bahwa hal ini dapat dilihat sebagai keterkaitan atas struktur permintaan pangan. Pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah, permintaan terhadap pangan akan tertuju pada pangan yang padat kalori, terutama berupa padi-padian. Selanjutnya Alderman seperti dikutip oleh Latief (2000) berpendapat bahwa peningkatan pendapatan akan mengakibatkan pangan yang dikonsumsi lebih beragam, serta umumnya akan terjadi peningkatan konsumsi pangan yang lebih kaya gizi. Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa pola konsumsi pangan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Indikator kesejahteraan yang diulas dalam publikasi ini dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan (*demand approach*) dan permintaan) dan pendekatan penawaran (*supply approach*). Konsumsi rumah tangga merupakan pendekatan dari sisi permintaan, sedangkan sisi penawaran lebih banyak berbicara pada banyaknya produksi bahan makanan yang mampu dihasilkan produsen pada tahun 2016.

Dalam operasionalnya di lapangan, untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Keterbukaan dan kesediaan rumah tangga sendiri untuk memberikan informasi yang sesungguhnya masih dirasa kurang kooperatif, sehingga informasi pendapatan rumahtangga akan cenderung *under estimate*. Maka dalam berbagai penelitian tingkat penghasilan rumah tangga

sering dilakukan dengan pendekatan/proksi pengeluaran konsumsi (*consumption approach*).

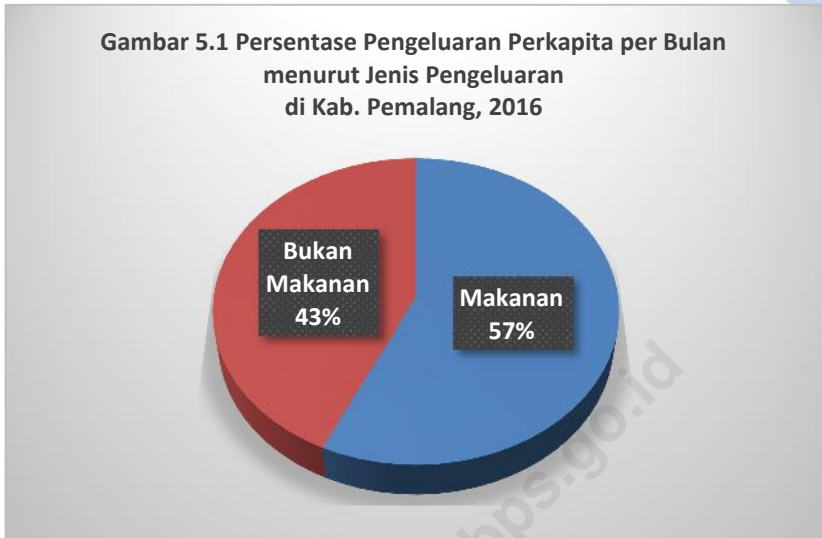
## 5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pendapatan untuk pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Menurut Berg (1986) di negara berkembang biasanya jumlah pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi keperluan bahan makanan adalah  $\frac{2}{3}$  dari total pendapatan. Pada keluarga dengan pendapatan terbatas menggunakan 80 persen dari total pendapatan keluarga untuk membeli bahan makanan, sedangkan pada keluarga dengan tingkat pendapatan lebih tinggi hanya sekitar 45 persen saja yang digunakan untuk keperluan membeli bahan makanan. Menurut Engel (1896), bila persentase makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen maka tingkat kesejahteraan sangat rendah.

Selanjutnya gambar 5.1 menunjukkan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi makanan masih lebih dominan dibanding bukan makanan. Di Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2016, persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 57 persen sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar 43 persen.

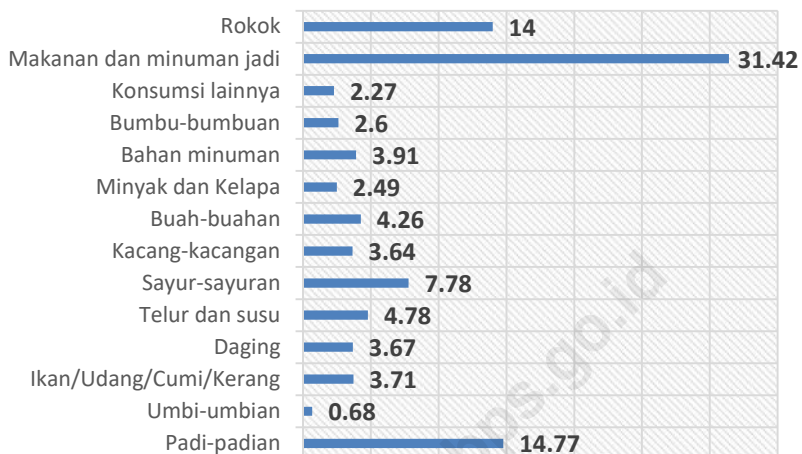


**Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kab. Pemalang, 2016**



Pada gambar 5.2 dan 5.3 ditunjukkan komposisi konsumsi rata-rata per kapita sebulan untuk beberapa jenis bahan makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2016 ini jenis pengeluaran yang persentasenya paling tinggi adalah makanan jadi, kemudian padi-padian dan sayur-sayuran. Jenis pengeluaran untuk rokok dan sirih merupakan pengeluaran keempat tertinggi. Masih tingginya konsumsi rokok ini, disamping harga rokok yang tinggi juga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengalokasikan pendapatannya untuk jenis komoditi yang mampu meningkatkan kesehatan keluarga. Dominannya kontribusi dan meningkatnya konsumsi bahan makanan/minuman jadi ini dimungkinkan terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat yang ingin lebih praktis dan siap saji serta kemudahan akses berbagai jenis makanan minuman jadi.

**Gambar 5.2 Persentase rata-rata Pengeluaran menurut kelompok MAKANAN di Kab. Pemalang, 2016**



**Gambar 5.3 Persentase rata-rata Pengeluaran Menurut kelompok BUKAN MAKANAN di Kab. Pemalang, 2016**



---

6

***Perumahan &  
Permukiman***

<http://pejalang.kab.go.id>

## BAB VI

### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rumah pada hakekatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan bagi masyarakat untuk memperoleh perumahan, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.. Pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat juga memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab sebagai fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat serta melakukan penelitian dan pengembangan juga menyediakan peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Dalam upaya penyediaan perumahan lengkap dengan sarana dan prasarana permukimannya, semestinya tidak sekedar untuk mencapai target secara kuantitatif (banyaknya rumah yang tersedia) semata-mata, melainkan harus dibarengi pula dengan pencapaian sasaran secara kualitatif (mutu dan kualitas rumah sebagai hunian), karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia selaku pemakai.

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di dalam masyarakat, perumahan merupakan pencerminan dan pengejawatahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dalam lingkungan alamnya.

Pada dasarnya, rumah berfungsi sebagai tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, terlindung dari berbagai gangguan, serta tempat beristirahat untuk melepaskan lelah sepulang dari bekerja. Lebih dari itu, idealnya rumah memiliki fungsi yang lebih kompleks. Sebaiknya rumah memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya pendidikan agama dan spiritual, moral, akademis, serta psikologis bagi para penghuninya. Rumah yang diciptakan dengan suasana yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan harmonis, diharapkan mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada masa sekarang ini, rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan bahkan dapat mencerminkan status lambang sosial dari pemiliknya (Azwar, 1996; Mukono, 2000).

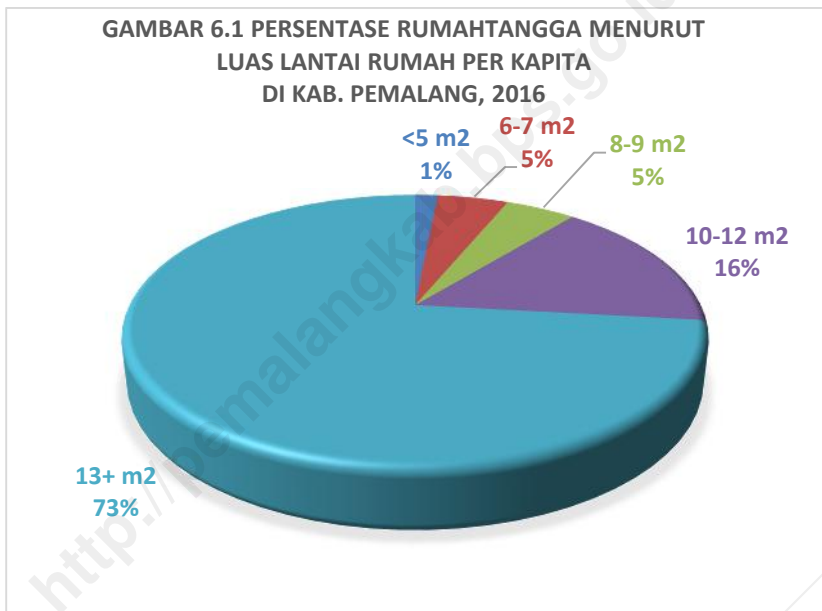
Kondisi ekonomi dan kesehatan seseorang salah satunya bisa dilihat dari rumahnya. Rumah merupakan salah satu determinan

kesehatan masyarakat. Karena itu, rumah yang sehat tentunya memiliki kriteria standar kelayakan sebuah rumah. Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang dapat memberikan suasana dan lingkungan yang nyaman dan berdampak baik bagi kesehatan para penghuninya. Kualitas rumah tinggal pada umumnya ditentukan oleh fisik rumah yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas rumah tinggal yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat dilihat dari luas lantai, jenis lantai terluas, jenis atap, jenis dinding, sumber air minum dan fasilitas buang air besar rumah tangga.

### **6.1 Luas Lantai**

Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan yang akan berdampak kurang baik terhadap kesehatan penghuninya. Rumah yang padat penghuni menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, disamping itu bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain.

Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minimal  $10 \text{ m}^2$  perkapita. Rumah dengan luas lantai lebih dari  $10 \text{ m}^2$  perkapita diharapkan penghuninya tidak berdesak-desakan sehingga dapat menghirup oksigen dengan cukup dan bisa merasa lebih nyaman.



Di Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil Susenas 2016, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari  $10 \text{ m}^2$  ke atas sudah mencapai 89 persen dan hanya tinggal 11 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari  $10 \text{ m}^2$  per kapita. Hal ini menggambarkan bahwa

sebagian besar penduduk sudah menghuni rumah dengan luas yang memadai dan memenuhi kriteria sehat dari segi luas lantainya.

## 6.2 Jenis Lantai

Ada berbagai jenis lantai rumah, diantaranya adalah ada yang terbuat dari semen atau ubin, keramik, atau cukup tanah biasa yang dipadatkan. Syarat lantai pada rumah sehat yang penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak becek pada musim hujan. Lantai yang basah atau berdebu akan menjadi sarang penyakit dan dapat mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.



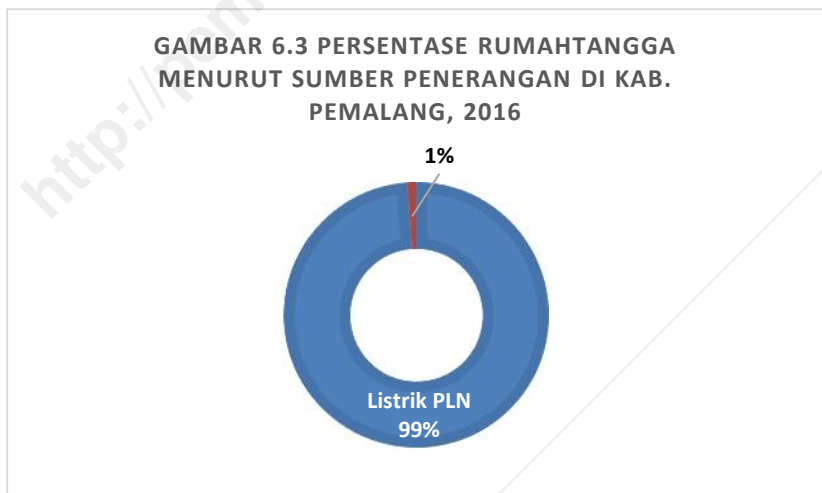
Berdasarkan Gambar 6.2 terlihat bahwa rumah tangga mayoritas sudah berlantaikan kramik/marmer/granit, yaitu mencapai 57,77 persen. Lantai terluas berikutnya berlantaikan tanah (16,58 persen), sedangkan yang berlantaikan semen ada sebanyak 15,3



persen. Masih adanya rumah yang berlantaikan tanah ini mengindikasikan belum sempurnanya tingkat kesehatan tempat tinggal dan kesejahteraan rumah tangga.

### 6.3 Sumber Penerangan

Fasilitas perumahan lain yang juga penting adalah penerangan. Penerangan selain mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya, dapat pula digunakan sebagai indikator pengukur keberhasilan program pembangunan pemerintah. Fasilitas penerangan ini dapat bersumber dari listrik atau bukan listrik seperti petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan penerangan petromak, pelita, dan sumber penerangan lainnya. Hal ini disebabkan karena cahaya listrik lebih terang, praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi.



Berdasarkan Gambar 6.3 terlihat bahwa pada tahun 2016, rumah tangga di Pemalang sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama sudah mencapai 98,87 persen dan hanya tinggal 1,13 persen yang belum menggunakan listrik PLN. Rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan ini dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Semakin meningkatnya kesadaran rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dari tahun ke tahun juga tak lepas dari program pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti setiap rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik sebagai pelanggan listrik, tetapi masih ada beberapa rumah tangga yang menggunakan listrik atas nama satu pelanggan. Kondisi seperti ini terjadi terutama di daerah pegunungan karena jarak jaringan listrik dengan rumah penduduk terlalu jauh sehingga satu unit meteran listrik dipakai oleh beberapa rumah.

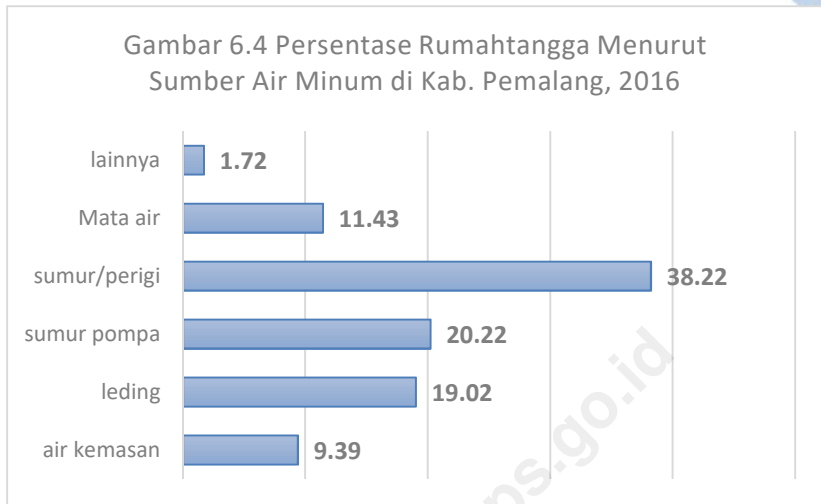
#### **6.4 Sumber Air Minum**

Selain dilihat dari kondisi fisik bangunannya, kualitas perumahan juga ditentukan oleh fasilitas yang ada di dalamnya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali salah satunya adalah tersedianya air bersih untuk minum.

Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air minum bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Untuk menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup perlu diperhatikan asal sumber air minumnya. Hal ini dikarenakan sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minumnya. Kualitas air yang dikonsumsi tubuh sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh penghuninya.

Di samping itu, sumber air minum yang digunakan penduduk juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keadaan ekonomi. Semakin banyak penduduk yang menggunakan air bersih bisa mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat semakin baik dan semakin banyak penduduk yang menggunakan air leding maupun air dalam kemasan sebagai sumber air minum sehari-hari mengindikasikan adanya peningkatan daya beli atau kesejahteraan rakyat.

Sumber air minum yang sampai saat ini masih dianggap terbaik adalah air dalam kemasan, karena sifatnya yang higienis. Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan air minum dalam kemasan baru mencapai oleh 9,39 persen dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Pematang. Meskipun penggunaan air minum kemasan masih relatif rendah, tetapi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.



Sumur/perigi paling banyak digunakan rumah tangga yaitu tercatat 38,22 persen. Sumber air minum berikutnya yang juga banyak digunakan rumah tangga adalah sumur pompa sebanyak 20,22 persen, kemudian menggunakan air leding sebagai sumber air minum yaitu sebesar 19,027 persen. Kenaikan atau penurunan persentase penggunaan suatu jenis sumber air minum ini bukan berarti bahwa rumah tangga tersebut berhenti menggunakan sumber air tersebut, tetapi rumah tangga ke sumber lain yang mereka anggap lebih higienis dan menggunakan sumber air yang lebih dulu digunakan bukan sebagai sumber air minum namun untuk keperluan lain seperti mencuci maupun memasak.

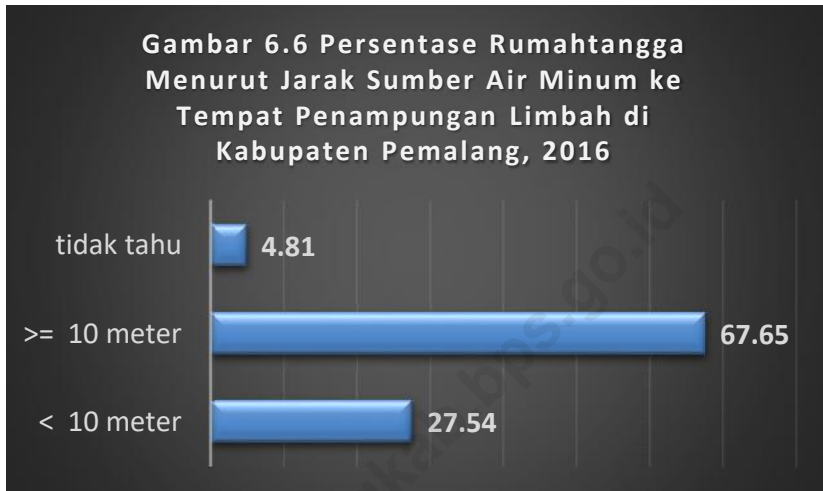
Berdasarkan cara memperoleh air minum sebagian besar rumahtangga tidak membeli yaitu sebesar 64,40 persen sebab sebagian besar memang rumah tangga menggunakan air sumur. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang cara memperoleh

air dengan membeli eceran sebanyak 8,82 persen dan yang membeli secara langganan sebanyak 26,78 persen



Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Bila sumber air minum dari sumur/perigi atau mata air maka perlu dilihat lagi apakah sumber tersebut terlindung dari air limbah/bekas pakai dan jarak dengan pembuangan akhir/limbah memenuhi syarat. Sumber air minum yang tidak terlindung air limbah/bekas pakai dan jarak penampungan air kotor ataupun limbah yang terlalu dekat dengan sumber air minum akan menyebabkan terjadinya perembesan ke dalam sumber air minum. Bila terjadi perembesan maka akan mempengaruhi kualitas air yang digunakan untuk

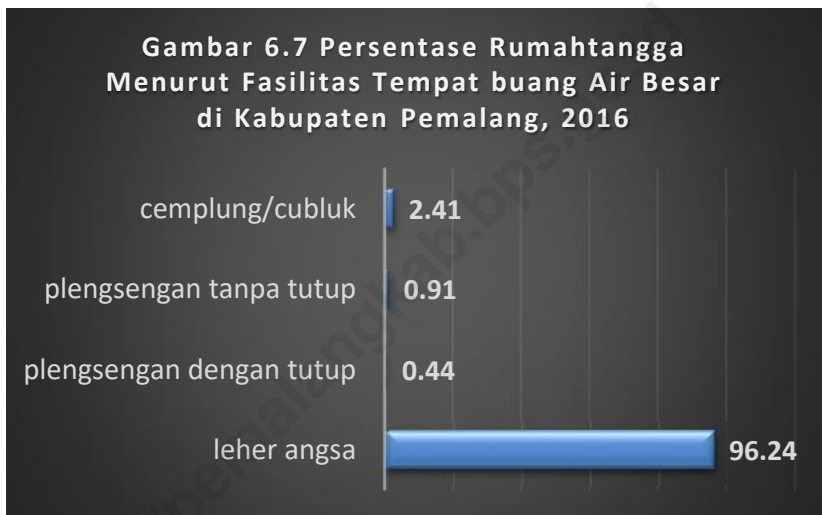
keperluan rumah tangga. Jarak antara penampungan air dengan sumber air minum yang dianjurkan adalah lebih dari 10 meter.



Di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 rumah tangga yang mempunyai jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran di atas 10 m sebanyak 67,65 persen dan 27,54 persen yang jarak penampungan terdekatnya kurang dari 10 m. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki penampungan air limbah dengan sumber air minum yang dianjurkan sudah relatif banyak, sehingga diharapkan sumber air minumnya sehat untuk dikonsumsi.

## 6.5 Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar (jamban) merupakan salah satu sarana pokok untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Tersedianya fasilitas yang memadai akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan pribadi manusia. Oleh karena itu peningkatan jenis fasilitas buang air besar dan peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya sarana ini harus terus disampaikan secara persuasif dan intens.



Berdasarkan Gambar 6.7 terlihat bahwa pada tahun 2016 fasilitas tempat buang air besar berjenis leher angsa merupakan jenis yang paling banyak digunakan rumah tangga di Kabupaten Pemalang, yaitu mencapai 96,24 persen. Fasilitas tempat buang air besar jenis leher angsa dianggap sebagai tempat buang air besar yang paling sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf "U" untuk menampung kotoran sehingga bau kotoran tidak keluar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Pemalang menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang relative sehat.

Selain jenis fasilitas tempat buang air besar, fasilitas perumahan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan yaitu tempat penampungan akhir buang air besar. Pada Gambar 6.8 dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir buang air besar yaitu sebanyak 68,27 persen. Tempat penampungan akhir buang air besar jenis tangki septik ini merupakan cara yang paling memenuhi persyaratan, oleh sebab itu, cara pembuangan tinja semacam ini yang dianjurkan. Sedangkan rumah tangga yang tempat penampungan akhir buang air besar kolam/sawah, sungai/danau/laut, lobang tanah, dan lainnya (pantai/kebun) di bawah 25 persen.

**Gambar 6.8 Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja di Kabupaten Pemalang, 2016**





## 6.6 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seiring dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu indikator semakin berkembangnya sarana informasi dan komunikasi adalah semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai sarana telepon, baik telepon rumah maupun telepon seluler. Pada era sebelum tahun 2000, kepemilikan telepon khususnya telepon seluler menjadi identitas gaya hidup dalam suatu masyarakat. Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi sekarang ini lebih populer dikalangan masyarakat dibanding telepon biasa. Dewasa ini kepemilikan telepon seluler tidak lagi menjadi identitas gaya hidup, akan tetapi sudah menjadi tuntutan kebutuhan hidup agar mudah berkomunikasi.

**GAMBAR 6.9 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI TELEPON SELULER (HP) DI KAB. PEMALANG, 2016**



Penggunaan telepon seluler dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini berbeda dengan peningkatan kepemilikan telepon rumah. Peningkatan kepemilikan telepon seluler (HP) cukup drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 rumahtangga yang memiliki HP mencapai 52,08 persen. Dratisnya peningkatan ini selain disebabkan karena telepon seluler sebagai tuntutan kebutuhan hidup juga disebabkan karena telepon seluler lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi di manapun berada dan ditunjang oleh jasa layanan jaringan (*provider*) yang semakin luas

---

7

# ***Kemiskinan***



<http://pemasaran.bps.go.id>

## BAB VII

### KEMISKINAN

#### 7.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya. Secara operasional penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan (BPS, 2012).

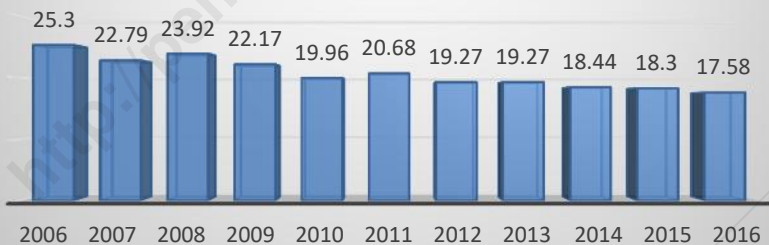
Tabel 7.1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Pematang, 2006-2016

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	(Rp/kapita/bln)	(000 orang)	(persen)
2006	144.570	338,20	25,30
2007	160.105	307,10	22,79
2008	185.526	325,15	23,92
2009	198.295	303,73	22,17
2010	216.365	251,70	19,96
2011	235.216	261,20	20,68
2012	251.986	245,90	19,27
2013	271.861	246,80	19,27
2014	287.358	236,98	18,44
2015	298.622	235.53	18.30
2016	319.434	227,08	17,58

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mencapai 17,58 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang terus mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan pada tahun 2012 relatif cukup tinggi, yaitu mencapai 1,41 poin dari 20,68 persen pada tahun 2011 menjadi 19,27 pada tahun 2012. Penurunan ini kemungkinan selain disebabkan karena banyaknya program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah pusat juga diakibatkan karena gencarnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan seperti program belanja di Pemalang, bedah rumah, dan lain sebagainya.

**Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin di Kab. Pemalang 2006-2016**



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan UNDP, 1997, *Ringkasan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996*, Jakarta : BPS-RI
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2017, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*, Semarang : BPS
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015*, Semarang : BPS
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2016, *Profil Kesehatan Tahun 2016*, Pemalang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2016, *Pemalang Dalam Angka Tahun 2016*, Pemalang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2017, *Pemalang Dalam Angka Tahun 2017*, Pemalang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015*, Pemalang : BPS



# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Tentara Pelajar 16 Pemalang  
Telp/Fax : (0284) 321169 Email: [bps3327@bps.go.id](mailto:bps3327@bps.go.id)  
Homepage: <http://pemalangkab.bps.go.id/>